

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini ditulis dan disusun dengan judul, “TINJAUAN YURIDIS POTENSI KARTEL DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR: 04/KPPU-I/2016 BERDASARKAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.” Penulisan tesis ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terlepas dari kesadaran Penulis, akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki penulis, penulis berharap semoga penulisan tesis ini dapat memberikan masukan dan manfaat lain yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam mengadakan penelitian guna penulisan tesis.

Dalam penulisan tesis ini Penulis banyak memperoleh bimbingan, pengarahan, saran-saran serta bantuan baik moril maupun materiil dari awal hingga selesainya tesis ini. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan kepada:

1. Bapak Dr, Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Prof. Dr. H.K. Martono, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

4. Ibu Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam penulisan tesis ini yang telah memberikan tenaga dan pikiran serta menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dan memberikan masukan dan ide-ide yang bermanfaat kepada Penulis sampai selesainya penulisan tesis ini.
5. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Penilai Teknis Penulisan dalam penulisan tesis ini.
6. Kedua orang tua Penulis yang telah membesarkan, mendidik dan mendukung Penulis sehingga Penulis dapat menjadi seperti sekarang ini.
7. Ingrid Setiany, istri penulis yang telah memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Sahabat-sahabat program studi Magister Ilmu Hukum angkatan 2015/2016 yang telah menjadi teman seperjuangan selama perkuliahan di FH Untar; dan
9. Pihak-pihak lain yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun kritik dan saran yang bersifat membangun kepada Penulis sangat diharapkan demi memberikan perbaikan dan penyempurnaan, sehingga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Judul	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Teori	13
F. Kerangka Konseptual	20
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Laporan Penelitian	25
BAB II PERKEMBANGAN PRAKTEK KARTEL DAN	
 PERATURAN KARTEL DI INDONESIA	28
A. Tinjauan Umum Mengenai Kartel	28
1. Kartel Berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha	34
2. Kerugian Praktek Kartel	51
3. Pendekatan <i>Rule of Reason</i> dan <i>Per se Illegal</i> dalam	
Kartel	54
a. Pendekatan <i>Rule of Reason</i>	60
b. Pendekatan <i>Per se Illegal</i>	63
B. Perjanjian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan	
Usaha Tidak Sehat	67
1. Perjanjian yang Dilarang dalam Undang-Undang	
Nomor 5 Tahun 1999	67
a. Oligopoli.....	73
b. Penetapan harga (<i>price fixing</i>)	74
c. Pembagian Wilayah (<i>market division</i>)	75
d. Pemboikotan (<i>boycott</i>)	75

e. Kartel (<i>cartel</i>)	76
f. Trust (<i>trust agreement</i>)	77
g. Oligopsoni	77
h. Integrasi Vertical	78
i. Perjanjian Tertutup (<i>exclusive dealing</i>)	80
j. Perjanjian dengan Luar Negeri	81
2. Perjanjian yang Dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	81
a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku	82
b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba ..	82
c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan	83
d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan	84
e. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas	85
f. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia	86
g. Perjanjian dan atau kebutuhan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri	86
h. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau.....	87
i. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya	87

BAB III	PENDEKATAN PEMBUKTIAN KASUS PERSAINGAN USAHA DAN PENERAPANNYA DALAM PENEGAKAN DAN PEMBUKTIAN KARTEL DI INDONESIA	89
	A. Aspek Pembuktian	89
	1. Definisi Pembuktian	89
	2. Teori Pembuktian	90
	3. Alat Bukti	92
	4. Bukti Langsung dan Tidak Langsung	96
	B. Penerapan <i>Rule of Reason</i>	98
	C. Penjabaran Unsur	100
	D. Ketentuan Lain yang Relevan	103
BAB IV	ANALISIS KASUS TERKAIT DUGAAN KARTEL YANG MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR:04/KPPU-I/2016	108
	A. Kasus Posisi	108
	B. Pembuktian Kartel dan Perjanjian Penetapan Harga Yang Dilakukan Yamaha Motor Indonesia dan Honda Motor Indonesia dalam Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999)	117
	C. Pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusannya	121
	1. Identitas Para Terlapor	122
	2. Dugaan Pelanggaran	122
	3. Aspek Hukum Formiil	123
	4. Industri Sepeda Motor Skutik	130
	5. Pasar Bersangkutan	131
	6. Perilaku Terlapor	132
	7. Penetapan Harga	138
	8. Dampak Terjadinya Kartel	145
	9. Pemenuhan Unsur Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999	147
	10. Rekomendasi Majelis Komisi	152
	11. Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus ...	152
	12. Perhitungan Denda	153

13. Diktum Putusan dan Penutup	155
D. Hasil Penelitian	156
1. Putusan KPPU Tentang Adanya Tindakan Yamaha Motor Indonesia dan Honda terbukti Melakukan Kartel	156
2. Indikasi Adanya Kejanggalan dalam Proses Pemeriksaan oleh Tim Investigasi KPPU	159
3. Permasalahan <i>Indirect Evidence</i> Sebagai Alat Bukti dalam Kartel	161
4. <i>Direct Evidence</i> Sebagai Pembuktian Terhadap Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999	163
BAB V PENUTUP	168
A. Kesimpulan	168
B. Saran	170
DAFTAR PUSTAKA	172
LAMPIRAN	

ABSTRAK

JUDUL TESIS: TINJAUAN YURIDIS POTENSI KARTEL DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR:04/KPPU-I/2016 BERDASARKAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

NAMA MAHASISWA: IBNU AKHYAT / **NIM:** 207152012

KATA KUNCI: POTENSI KARTEL DALAM PUTUSAN KPPU

ISI:

Kartel pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan antar pelaku usaha dalam sektor yang sama yang seyogianya merupakan pesaingnya untuk melakukan tindakan tertentu berupa menghilangkan persaingan di antara pelaku usaha tersebut. Dalam praktiknya, kartel secara umum dilakukan melalui tiga hal yaitu: pengaturan harga, pengaturan produksi dan pengaturan wilayah pemasaran. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pendekatan dan metode pembuktian kartel berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999? dan apakah Putusan KPPU Nomor: 04/KPPU-I/2016 antara PT Yamaha Indonesia Manufacturing dengan PT Astra Honda Motor dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 cc di Indonesia telah sesuai penerapannya dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung data kepustakaan, dimana cara pengolahan sumber data dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Dalam penelitian ini Penulis ingin *review* perihal praktek kartel sebagai pelanggaran yang sangat sulit untuk dibuktikan, dikarenakan kasus kartel jarang atau tidak memiliki bukti langsung (*hard evidence*). Karena hal tersebut, munculnya bukti tidak langsung (*indirect evidence*) sebagai alat bukti digunakan KPPU untuk memutus perkara kartel. Bukti tidak langsung yang digunakan pada kasus kartel sepeda motor ini adalah adanya pergerakan harga menunjukkan adanya tren yang sama diantara para terlapor. Hasil ini menyimpulkan bahwa adanya koordinasi antara kedua perusahaan dalam menentukan harga. Dimana Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016 berkaitan dengan penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan otomotif terkenal. Perusahaan-perusahaan otomotif tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 5 mengenai penetapan harga. Namun menurut pendapat penulis putusan tersebut tidak benar.

ABSTRACT

THESIS TITLE: *JURIDIS REVIEW OF POTENTIAL CARTEL IN DECISION KPPU NUMBER: 04/KPPU-I/2016 UNDER ARTICLE 11 UNDER NUMBER 5 OF 1999 CONCERNING PROHIBITION OF MONOPOLY AND COMPETITION PROGRAMS BUSINESS IS NOT HEALTHY*

STUDENT NAME: IBNU AKHYAT / **NIM:** 207152012

KEYWORDS: *POTENTIALS OF THE CARTEL IN DECISION OF KPPU*

CONTENTS:

Cartel is basically a form of agreement or agreement between business actors in the same sector that should be a competitor to perform certain actions in the form of eliminating competition among business actors. In practice, the cartel is generally done through three things: price setting, production arrangement and marketing area arrangement. The problem raised in this research is how to approach and method of proof of cartel based on Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and Commission Regulation no. 4 of 2010 concerning Guidelines for the Implementation of Article 11 on the Cartel based on Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Business Competition No? and whether the Decision of KPPU Number: 04 / KPPU-I / 2016 between PT Yamaha Indonesia Manufacturing and PT Astra Honda Motor in Motorcycle Industry Scooter Matic Type 110-125 cc in Indonesia has been in accordance with the provisions of Article 11 of Law Number 5 of 1999. The research method used is normative law research method supported by bibliography data, where the way of processing data source is done deductively that is drawing conclusion from a problem which is general to the concrete problem faced. In this study the author wants to review the practice of cartel as a violation that is very difficult to prove, because the cartel case rarely or do not have direct evidence (hard evidence). Because of this, the emergence of indirect evidence as evidence used by KPPU to decide the cartel case. The indirect evidence used in the case of this motorcycle cartel is that the price movement indicates a similar trend among the reported. These results conclude that there is coordination between the two companies in determining the price. Where KPPU Decision No.04/KPPU-I/2016 relates to the pricing done by well-known automotive companies. The automotive companies have met the elements in Article 5 concerning pricing. But in the opinion of the author of the verdict is not true.